



# LKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# 2022

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

# PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan pembangunan sektor urusan perdagangan dan perindustrian Tahun 2022.

Gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi di masa yang akan datang.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini sehingga dapat selesai tepat waktu. Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kupang, Januari 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, *st*



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 merupakan media pemantauan dan evaluasi kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun yang menjadi perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Secara ringkas dari hasil pengukuran kinerja yang dilakukan menunjukkan keberhasilan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan dengan akumulasi pencapaian kategori **Sangat Berhasil**. Hal ini ditunjukkan dari data capaian kinerja pada tabel berikut ini :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,25	1,21	96,80 %
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11	12,05	100 %
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	3	100	100 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>						<b>98,93%</b>

Ketercapaian target kinerja tahun 2022 terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan didukung oleh sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, pengendalian terhadap sumber daya serta komitmen dalam meningkatkan kinerja instansi.

Upaya yang dilakukan dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan melaksanakan program/kegiatan-kegiatan yang berkontribusi langsung dalam pencapaian target dari indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Namun, dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menghadapi tantangan dan permasalahan yang selanjutnya akan dijelaskan secara rinci dalam dokumen ini.

Adapun tingkat pencapaian kinerja yang baik akan dipertahankan dan ditingkatkan menjadi semakin baik pada tahun-tahun mendatang, sedangkan permasalahan yang ada dan muncul akan dicarikan jalan keluarnya sehingga tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.\*\*\*

# DAFTAR ISI

PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.4 Struktur Organisasi .....	3
1.5 Sumber Daya Manusia.....	5
1.6 Dasar Pelaksanaan .....	8
1.7 Isu Strategis .....	8
1.8 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	10
2.1 Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	10
2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur .....	10
2.1.2 Tujuan dan Sasaran.....	11
2.2 Rencana Tahunan (RKT) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	13
2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	13
2.2.2 Program Dukungan Dana Dekon dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	19
2.2.3 Indikator .....	20
2.3 Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	33
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	33
3.2 Evaluasi Capaian Kinerja .....	35

3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	59
3.3.1 Anggaran Bersumber Dari APBD.....	59
3.3.2 Anggaran bersumber dari APBN .....	62
BAB IV PENUTUP .....	54
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi.....	63

## LAMP IRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin .....	5
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan .....	6
Tabel 1.4	Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon .....	7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	12
Tabel 2.2	Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT .....	14
Tabel 2.3	Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022 .....	19
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Urusan Perindustrian .....	20
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Urusan Perdagangan .....	21
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	27
Tabel 2.7	Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2022 .....	28
Tabel 2.8	Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022 .....	29
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 .....	33
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2022.....	34
Tabel 3.3	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan).....	36
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1 .....	36
Tabel 3.5	Alokasi Bantuan Mesin Pencacah Pakan Ternak Tahun 2022 .....	41
Tabel 3.6	Alokasi Bantuan Pokir Tahun 2022.....	42
Tabel 3.7	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan).....	44
Tabel 3.8	Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2 .....	45
Tabel 3.9	Alokasi Paket Sembako pada Kegiatan Pasar Murah .....	46
Tabel 3.10	Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok.....	48
Tabel 3.11	Kenaikan/Penurunan Harga Barang Penting.....	49
Tabel 3.12	Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi.....	52
Tabel 3.13	Nilai Ekspor non migas (US \$) Tahun 2021 - 2022.....	54
Tabel 3.14	Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1 .....	55
Tabel 3.15	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2022 .....	59
Tabel 3.16	Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2022 .....	59
Tabel 3.17	Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2021 .....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Keberadaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat menjawab tantangan urusan perindustrian dan perdagangan. Sebagai dinas teknis, keberadaan dinas ini menjadi salah satu pilar untuk mendukung pelaksanaan urusan yang telah dibebankan dan membantu kepala daerah dalam mencapai visi dan misi pembangunan sebagaimana terdapat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, tentunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk mewujudkan *good governance and clean government* yang merupakan tuntutan dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki tiga landasan yang utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan bagian dari Sistem Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya, dimana penyusunan dan pelaporannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempertanggung-jawabkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran negara selama Tahun dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan dengan pengukuran pencapaian kinerja merujuk pada indikator kinerja input, output dan outcome dari setiap program dan kegiatan.

## **1.2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah untuk memberi informasi mengenai capaian kinerja indikator sasaran yang telah ditetapkan selama 1 (satu) tahun anggaran .

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah/LKIP adalah sebagai pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Rencana Strategis dan sebagai tindak lanjut atau amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/SAKIP.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perdagangan.

### **a. Tugas Pokok**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan perdagangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

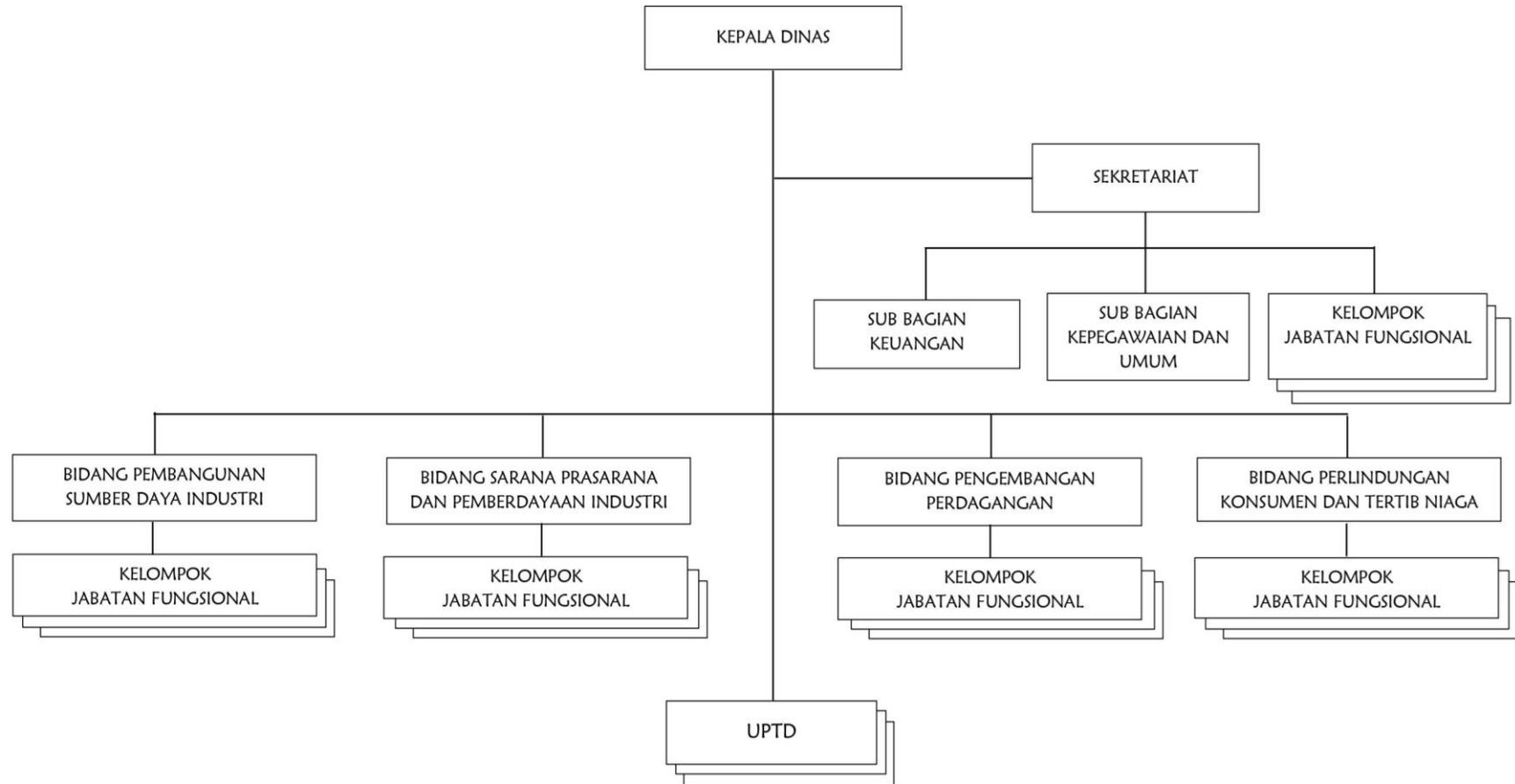
#### 1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019, Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Tipe A. Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, terhadap Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 sebagaimana di atas perlu diubah dan disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku.

Selain peraturan diatas, ada juga Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang menjadi dasar terbentuknya UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang di Kupang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara disajikan dalam Bagan Struktur Organisasi Timur sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



## 1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia menjadi salah satu pilar utama dalam menjalankan tugas dan pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum potensi sumber daya manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan pembagian jenis kelamin, tingkat pendidikan dan golongan.

Tabel 1.1  
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Pegawai	Jumlah (orang)	Jenis Kelamin	
			L	P
<b>A. Dinas Induk (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT)</b>				
1	PNS	51	27	24
2	CPNS	6	1	5
3	Tenaga Kontrak	31	18	13
<b>B. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b>				
1	PNS	12	6	6
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	5	2	3
<b>C. Deskransda Provinsi NTT</b>				
1	PNS	-	-	-
2	CPNS	-	-	-
3	Tenaga Kontrak	30	13	17
<b>Jumlah</b>		<b>135</b>	<b>67</b>	<b>68</b>

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022

Dari Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa jumlah pegawai Aparatur Sipil Negara sampai dengan Desember tahun 2022 berjumlah 69 orang yang terdiri dari 34 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Sedangkan tenaga kontrak berjumlah 66 orang yang terdiri dari 33 orang laki-laki dan 33 orang perempuan.

Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2  
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Sekretariat	Bidang PSDI	Bidang SPPI	Bid Pengembangan Perdagangan	Bidang PKTN	UPTD PSMB
1.	S2	3	2	2	-	1	2
2.	S1	15	4	6	11	2	5
3.	Diploma	2	1	-	-	1	-
4.	SMA	3	1	1	-	1	5
5.	SMP	-	-	-	-	-	-
6.	SD	-	-	-	-	-	-
J U M L A H		S2 = 10	S1 = 43	Diploma = 4	SMA = 12	SMP = 0	SD = 0

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022

Tabel 1.2 di atas terlihat bahwa ada 43 orang dari total 69 aparatur atau 62,32% ASN pada Dinas Prindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pendidikan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya aparatur cukup memadai dalam mendukung kinerja pelayanan perangkat daerah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keadaan ini memberikan harapan akan ketersediaan SDM yang lebih dinamis dan responsif terhadap inovasi dalam menangani permasalahan urusan perdagangan dan perindustrian di NTT.

Komposisi pegawai pada tabel 1.2 di atas berdasarkan jumlah Golongan sebagai berikut :

- Golongan IV sebanyak 8 orang;
- Golongan III sebanyak 53 orang;
- Golongan II sebanyak 8 orang;
- Golongan I tidak ada.

Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3  
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Golongan

Golongan	Sekretariat		Bid PSDI		Bid SPPI		Bid Pengembangan Perdagangan		Bid PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV c	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
IV b	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3

Golongan	Sekretariat		Bid PSDI		Bid SPPI		Bid Pengembangan Perdagangan		Bid PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
IV a	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	4
III d	2	5	2	3	-	2	3	2	-	1	-	3	22
III c	-	1	-	-	1	-	2	2	2	-	1	1	11
III b	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	9
III a	1	3	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	11
II d	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	6
II c	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
II b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	12	11	3	5	3	6	6	5	4	2	6	6	69

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022

Dari jumlah tersebut di atas terdapat 7 pejabat struktural, 7 pejabat fungsional dan 55 jabatan administrasi.

Komposisi ASN berdasarkan Jabatan/Eselon dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4  
Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur Berdasarkan Jabatan/Eselon

Jabatan/ Eselon	Sekretariat		Bid PSDI		Bid SPPI		Bid Pengembangan Perdagangan		Bid PKTN		UPTD PSMB		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
II	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
III	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	5
IV	3	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	3	12
Staf	8	10	3	4	2	4	4	4	3	1	5	3	51
Total	12	11	3	5	3	6	6	5	4	2	6	6	69

Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022

Selain Sumber Daya Manusia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur juga memiliki aset/modal berupa tanah, gedung kantor, kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2 serta sarana dan prasarana kerja untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja.

## 1.6 DASAR PELAKSANAAN

Dasar penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT sebagai berikut :

1. TAP MPR RI Nomor 11/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi , Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.7 ISU STRATEGIS

Sebagaimana tercermin dalam Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dengan demikian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

- 1) Pertumbuhan ekonomi di pusat pengembangan pariwisata (*Tourism estate in the ring of beauty*).
- 2) Peningkatan kapasitas ekspor dan nasional
- 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi unggulan NTT dalam rangka meningkatkan pemasaran regional, nasional dan ekspor
- 4) Menyediaan Informasi harga dan pasar secara real time
- 5) Pendampingan bagi UKM untuk pemasaran berbasis *online* kedepan (sesuai perkembangan Revolusi Industri 4.0)
- 6) Pengawasan barang dan jasa yang beredar
- 7) Peningkatan perlindungan konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang perangkat daerah, maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan jumlah pegawai, dasar pelaksanaan dan sistematis penyajian.

### **BAB II. PERENCANAAN KINERJA**

Dalam Bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (Dokumen Perjanjian/Penetapan Kinerja Tahun 2022).

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang diambil.

Selanjutnya disajikan akuntabilitas keuangan, cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

### **BAB IV. PENUTUP**

Pada bagian ini dikemukakan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

### **LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD). Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan yang menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan yang akan dicapai dalam periode 2018-2023. Renstra menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Oleh karena itu, Renstra merupakan pendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah periode 2018-2023 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **2.1.1 Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur**

Visi Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur seperti yang tertuang pada RPJMD Perubahan 2018-2023 yaitu **“NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Perwujudan visi ini ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan yakni :

1. Misi 1, Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil
2. Misi 2, Membangun NTT sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (*ring of beauty*).
3. Misi 3, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur untuk Mempercepat Pembangunan.
4. Misi 4, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia.
5. Misi 5, Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Dari kelima misi di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung misi pertama dan misi kedua. Selama 5 (lima) tahun ke depan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan

melaksanakan 1 (satu) program yakni Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian, dimana pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk mendukung Misi Pertama dan Misi Kedua serta program lintas sektor pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Program NTT Bangkit.

Pelaksanaan Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang searah dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pencapaian *outcome* kegiatan ditujukan untuk mendukung sasaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah, terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, serta terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities* dan *Awareness*)

### **2.1.2 Tujuan Dan Sasaran**

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, baik urusan wajib pelayanan dasar dan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing misi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
				2021	2022	2023
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah	Meningkatnya kualitas dan keragaman produk industri unggulan daerah	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB (%)	1,31	2,15	3,50
2	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	Pertumbuhan IKM dengan Produk Unggulan Lokal Berorientasi Ekspor (%)	3,50	4,00	4,50
3	Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke pasar regional dan internasional	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok (%)	8,50	8,50	8,50
			( $KV_{pt} = S_n/p \times 100\%$ ) Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas (%)	5,00	10,00	15,00
4	Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standardisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (%)	95,00	95,00	95,00
			Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku (%)	-	30,00	70,00
5	Meningkatkan Kualitas Kinerja Aparatur dan Organisasi	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Capaian Reformasi Birokrasi (%)	80,00	85,00	90,00

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

## **2.2 RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

### **2.2.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan industri dan pengembangan perdagangan NTT selama periode 2018-2023.

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan RPJMD Perubahan Provinsi NTT, permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.2  
Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Industri dan Pengembangan Perdagangan NTT

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil</b>			
Meningkatnya nilai tambah dan daya saing industri unggulan daerah	Meningkatnya Kualitas dan Keragaman Produk Industri Unggulan Daerah	1) Meningkatkan pembangunan Sumber Daya Manusia Industri dan Sumber Daya Alam	1) Peningkatan kompetensi teknis dan manajerial Wirausaha Industri, Tenaga Kerja Industri dan Pembina Industri 2) Pengembangan industri yang berbasis Sumber Daya Alam 3) Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran SDA
		2) Mengembangkan dan Memanfaatkan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi	4) Pemanfaatan teknologi industri dalam pengembangan budaya industri dan/atau kearifan lokal 5) Fasilitasi masyarakat untuk mendorong kreatifitas dan inovasi dalam pengembangan produk 6) Fasilitasi ketersediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi
		3) Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Industri	7) Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah terkait perijinan di bidang industri 8) Pemantauan, pengawasan kepatuhan usaha dan pemberian sanksi administrasi untuk pelanggaran perijinan industri, terutama terhadap IUI, IUKI dan IPKI
Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Industri di Seluruh Wilayah Provinsi	Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar	1) Meningkatkan Kapasitas Industri Kecil dan Menengah dalam Rantai Nilai ( <i>Value Chain</i> ) dan Rantai Pasokan ( <i>Supply Chain</i> ) yang Terintegrasi dengan Industri	1) Peningkatan pertumbuhan industri di daerah tujuan Pariwisata <i>Estate</i> dan industri yang berbasis komoditas unggulan provinsi dan lintas kabupaten/kota. 2) Penguatan kapasitas IKM melalui peningkatan kemampuan sentra, UPT, Fungsional Penyuluh dan Konsultan IKM; serta kerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Litbang, Asosiasi Industri dan Asosiasi Profesi

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil</b>			
		Besar	terkait  3) Bimtek, fasilitasi bantuan, akses pembiayaan, promosi dan pengembangan produk unggulan daerah 4) Fasilitasi pola kemitraan/ kerjasama antara industri kecil, industri menengah, industri besar dan sektor industri dengan sektor ekonomi lainnya.
		2) Memfasilitasi Industri, Industri Hijau, dan Standardisasi Industri	5) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri 6) Fasilitasi Pembangunan Sentra IKM, minimal 1 (satu) Sentra di setiap Kabupaten/Kota, dan/atau Sentra Industri Kreatif 7) Penyusunan rancangan regulasi teknis dan standardisasi industri dalam pengembangan produk unggulan
		3) Menyediakan Data dan Informasi Industri	8) Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) NTT 9) Penyediaan data dan informasi industri yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 10) Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sistem Informasi
Meningkatnya jaringan distribusi produk daerah ke	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi	1) Meningkatkan kontribusi perdagangan besar, kecil serta sektor real dalam	1) Peningkatan pertumbuhan perdagangan di daerah tujuan Pariwisata estate 2) Fasilitasi Peningkatan SDM, Pembiayaan dan bantuan peralatan di

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil</b>			
pasar regional dan internasional	pasar dan produk unggulan daerah	peningkatan PDRB NTT	daerah tujuan pariwisata estate
		2) Meningkatkan fasilitas dan pemasaran produk dalam Negeri	3) Penguatan aktivitas perdagangan melalui penyediaan dan peningkatan sarana perdagangan untuk kelancaran pemasaran produk dalam Negeri
		3) Meningkatkan distribusi produk lokal Unggulan Daerah	4) Peningkatan arus distribusi untuk pemerataan barang dan jasa di semua wilayah
		4) Meningkatkan akses pasar dalam Negeri	5) Penguatan jejaring pemasaran dan perluasan akses pasar produk unggulan daerah
			6) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk lokal Unggulan Daerah
		5) Meningkatkan sistem informasi perdagangan dalam negeri	7) Peningkatan sistem informasi perdagangan dalam negeri
		6) Meningkatkan pengendalian harga dan distribusi barang jasa	8) Peningkatan koordinasi dengan pelaku usaha dan pihak terkait dalam rangka pengendalian harga dan distribusi Bapok serta Banting
		7) Meningkatkan pertumbuhan ekspor non migas melalui hilirisasi	9) Pengembangan kinerja perdagangan luar negeri melalui Skema Kerjasama Selatan Selatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil</b>			
		8) Meningkatkan Kualitas Produk ekspor melalui Fasilitas standarisasi produk ekspor	10) Peningkatan mutu produk ekspor sesuai standar yang berlaku 11) Peningkatan SDM Pelaku Usaha dan kelembagaan ekspor
		9) Meningkatkan aktivitas ekspor dan pengendalian impor melalui fasilitas perdagangan;	12) Pengendalian impor bahan baku dan barang modal;
		10) Menjamin aktivitas perdagangan luar negeri sesuai Kebijakan yang berlaku	13) Koordinasi dan sinergi antar stakeholder dan pelaku usaha dalam penerapan kebijakan perdagangan luar negeri dalam aktivitas perdagangan luar negeri
Meningkatkan perlindungan konsumen dan tertib niaga	1) Meningkatnya pemberdayaan konsumen, standarisasi, pengendalian mutu produk dan pengawasan barang dan jasa	1) Mengembangkan standarisasi, mutu produk, regulasi pro konsumen 2) Pemberdayaan konsumen 3) Penguatan kapasitas kelembagaan laboratorium pengujian mutu dan	1) Peningkatan pengujian/sertifikasi mutu barang dan pengawasan barang dan jasa yang beredar 2) Peningkatan kesadaran Pelaku Usaha dan Konsumen terhadap K3I dalam produksi dan konsumsi produk 3) Pembentukan kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/ Kota

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Misi I Mewujudkan Masyarakat Sejahtera, Mandiri dan Adil</b>			
		kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) di Kabupaten/Kota	
Meningkatkan Kualitas Kinerja organisasi	1) Meningkatnya sarana dan prasarana kerja	1) Peningkatan sarana dan prasarana kerja dasar	1) Penyediaan sarana dan prasarana sesuai tuntutan kerja
	2) Meningkatnya sistem pelayanan perencanaan dan pelaporan	2) Peningkatan pelayanan perencanaan dan ketepatan waktu pelaporan	2) Penyediaan Sistem informasi publik dan pelaporan secara <i>online</i>
	3) Meningkatnya kompetensi SDM	3) Peningkatan pelatihan teknis sumber daya manusia	3) Peningkatan profesionalisme aparatur

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2018-2023

## 2.2.2 Program Dukungan Dana APBN dan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Untuk menjalankan program kegiatan tahun 2022, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat anggaran dana APBN dan APBD. Rincian besarnya anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3  
Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022

No.	SUMBER DANA/PROGRAM	PAGU ANGGARAN 2022 (Rp.)
<b>A.</b>	<b>DANA APBN</b>	
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	964.000.000,-
2	Program Perdagangan Luar Negeri	394.121.000,-
3	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	699.314.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.057.435.000,-</b>
<b>B.</b>	<b>DANA APBD</b>	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.795.089.830,-
2	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20.840.400,-
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.333.545.540,-
4	Program Pengembangan Ekspor	32.169.800,-
5	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	343.056.100,-
6	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.406.301.000,-
7	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.789.845.600,-
8	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	57.328.100,-
9	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	43.654.800,-
	<b>Jumlah</b>	<b>18.821.831.170,-</b>

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 2.3 di atas terlihat bahwa pelaksanaan program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022 didukung dana APBN sebesar Rp. 2.057.435.000,- (Dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan dana APBD sebesar Rp 18.821.831.170,- (Delapan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).

### 2.2.3 Indikator

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas serta mandat (*core business*) yang diemban.

#### 1. Urusan Perindustrian

Sektor industri mendukung pencapaian visi dan misi dari pencapaian kinerja pada aspek daya saing daerah dengan indikator kontribusi sektor industri terhadap PDRB NTT.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) program urusan perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.4  
Indikator Kinerja Urusan Perindustrian

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	NA	1,2	1,25	1,25

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

## 2. Urusan Perdagangan

Ada 2 (dua) sasaran dalam pencapaian Indikator makro Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan urusan perdagangan yaitu Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan dan Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional masing-masing sasaran terdapat 1 (satu) indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan perdagangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 96 Tahun 2022 tanggal 15 September 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan perdagangan pada Program Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023 seperti pada tabel berikut :

Tabel 2.5  
Indikator Kinerja Urusan Perdagangan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2018)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-		
					2021	2022	2023
1	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	NA	10	11	12
2	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	NA	2	3	3

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

### 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan beserta indikator kinerja. Dengan perjanjian kinerja akan terwujud komitmen dan kesepakatan antara pemberi dan penerima amanah atas kinerja terukur. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan berguna untuk menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan rencana kinerja akan memudahkan dalam mengukur tingkat capaian kinerja pada akhir tahun dengan melakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja utama.

Namun dalam perjalanan Tahun 2022, terjadi perubahan terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perubahan ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023, serta karena adanya *redesign* (perubahan) anggaran.



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

16 November 2022

Pihak Kedua  


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Pihak Pertama,  


**Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM**

LAMPIRAN :

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,2	1,25	$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10	11	$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	2	3	$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

**B. Pelaksanaan Anggaran**

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)	Rp. 18.821.831.170 ,-	Realisasi minimal 85%

	1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	9.795.089.830 ,-	Realisasi minimal 90%
	2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	20.840.400 ,-	Realisasi minimal 85%
	3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	1.333.545.540 ,-	Realisasi minimal 85%
	4.	Pengembangan Ekspor	Rp.	32.169.800 ,-	Realisasi minimal 85%
	5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	343.056.100 ,-	Realisasi minimal 85%
	6.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	3.406.301.000 ,-	Realisasi minimal 85%
	7.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	3.789.845.600 ,-	Realisasi minimal 85%
	8.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	57.328.100 ,-	Realisasi minimal 85%
	9.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	43.654.800 ,-	Realisasi minimal 85%
	<b>b) Pendapatan</b>		<b>Rp.</b>	<b>488.800.000 ,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>
<b>2)</b>	<b>APBN</b>				
	<b>Program (Dekonsentrasi)</b>				
	1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	964.000.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	699.314.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	3.	Perdagangan Luar Negeri	Rp.	545.859.000 ,-	Realisasi minimal 90%
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>2.209.173.000 ,-</b>	<b>Realisasi minimal 90%</b>

- C. Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100 %, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;**
- D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022;**
- E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);**

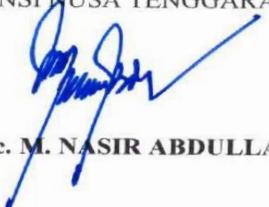
- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);**
- G. Rata-rata realisasi PPK Online seluruh ASN di Perangkat Daerah minimal 90%;**
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP :**
  - 1. TL temuan di bawah tahun 2020; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 75 %;
  - 2. TL temuan di atas tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100 %;
- I. Memiliki Sertifikat Manajemen ISO 9001: 2015;**
- J. Jumlah Inovasi Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-NADI paling lambat Tanggal 1 Maret 2022;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75);**
- N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.**

16 November 2022

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

 KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM

Tabel 2.6  
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	
1	2	3	4	5	6
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,2	1,25	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10	11	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	2	3	$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } n} \times 100\%$

Sumber Data : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT Tahun 2022

Sedangkan dukungan anggaran baik APBD maupun APBN Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7  
Dukungan Anggaran APBD dan APBN Tahun 2022

<b>A.</b>	<b>APBD</b>	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp. 9.795.089.830,-
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp. 20.840.400,-
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 1.333.545.540,-
4.	Pengembangan Ekspor	Rp. 32.169.800,-
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 343.056.100,-
6.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp. 3.406.301.000,-
7.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 3.789.845.600,-
8.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 57.328.100,-
9.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp. 43.654.800,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 18.821.831.170,-</b>
<b>B.</b>	<b>APBN</b>	
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp. 964.000.000,-
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 394.121.000,-
3.	Perdagangan Luar Negeri	Rp. 699.314.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 2.057.435.000,-</b>

Untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan pada tujuan dan sasaran strategis, dilaksanakan program kegiatan yang berkontribusi dalam rangka mewujudkan capaian target per sasaran. Program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8  
Program dan Kegiatan Pendukung Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2022

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program	Target	Kegiatan Pendukung	
1.	Terjaganya kestabilan harga barang dan terciptanya diversifikasi pasar dan produk unggulan daerah	<b>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan</b>			1. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	
		a. Kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir	Peningkatan penggunaan sistem berbasis online (%)	30		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen SKA yang dikeluarkan	10		
			<b>Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>			1. Pasar Murah Bersubsidi 2. Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri (PROGNOSA) 3. Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Pasar Tradisional 4. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
		a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi	Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi (%)	100		
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Bantuan Sembako yang disalurkan (paket)	8500		
		b. Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Cakupan pengambilan data harga (%)	100		
		- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	1		
		- Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program	Target	Kegiatan Pendukung	
		c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya (%)	100		
		- Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	1		
		<b>Program Pengembangan Ekspor</b>				1. Penyusunan Katalog Produk Ekspor NTT
		a. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota (%)	100		
		- Peningkatan citra produk ekspor	Jumlah Produk Unggulan ekspor Daerah yang disusun menjadi materi promosi	5		
		<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>				1. Pelatihan Pemasaran <i>Online</i>
		a. Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri (%)	100		
		- Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	150		
2.	Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>			1. Edukasi Konsumen 2. Pengawasan Barang Wajib SNI, Label, Petunjuk Manual dan Kartu Garansi 3. Pengawasan Makanan, Minuman dan Obat-Obatan Kadaluaarsa 4. Pengawasan Khusus Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	
		a. Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		
		- Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumlah Pelaku Usaha maupun Konsumen yang telah teredukasi dan terberdayakan	70		
		b. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota (%)	100		

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program	Target	Kegiatan Pendukung
		- Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah laporan hasil pengawasan barang beredar dan jasa serta kegiatan perdagangan yang diawasi	2	
		- Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen	Jumlah kasus yang ditangani	5	
		<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang)</b>			
		a. Pelaksanaan Pengujian dan Serifikasi Mutu Produk di seluruh daerah kab/kota	Terlaksananya Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota (%)	100	1. Layanan Pengambilan Sampel 2. Magang 3. Layanan Kalibrasi 4. Kalibrasi Peralatan Standar dan Interkomparasi 5. Koordinasi/Konsultasi Dalam Rangka Proses Akreditasi
		- Pengembangan layanan pengujian	Jumlah dokumen hasil pengujian mutu barang	25	
		- Pengembangan layanan kalibrasi	Jumlah layanan kalibrasi (pelaku usaha)	15	
3.	<b>Menguatnya peran IKM dalam rantai nilai dan rantai pasok yang terintegrasi dengan industri besar</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>			
		a. Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Terlaksananya Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (%)	100	1. Pengembangan Sentra dan Kawasan Industri 2. Pengembangan Kerajinan Bambu 3. Fasilitas HKI Merek 4. Fasilitasi HKI Paten 5. Pengembangan Industri Pakan Ternak 6. Fasilitasi Sertifikasi Halal 7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (POKIR) 8. Bantuan Mesin Pencacah Pakan Ternak
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	2	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	2	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah laporan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2	
		- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	7	

No.	Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program	Target	Kegiatan Pendukung
		<b>Program Pengendalian Izin Usaha Industri</b>			1. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Industri
		a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi (%)	100	
		- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	1	
		<b>Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>			1. Penyusunan Data dan Informasi Industri dan Data Izin Industri
		a. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional	Terlaksananya Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (%)	100	
		- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1	

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam penilaian kategori keberhasilan dan ketercapaian target yang telah ditetapkan didasarkan pada kategori yang digunakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam menilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.  
Skala Pengukuran Capaian Kinerja Tahun

	Skala Pencapaian Kinerja	Kategori
Adapun penilaian tingkat capaian Kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut:	$X \geq 85\%$	Sangat Berhasil
	$75\% \leq X < 85\%$	Berhasil
	$55\% \leq X < 75\%$	Cukup Berhasil
	$X < 55\%$	Belum Berhasil

#### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Tingkat capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun berdasarkan hasil pengukurannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

***Capaian Indikator Kinerja = Realisasi/Target × 100%***

Tabel 3.2  
Capaian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Dasar 2021	Tahun 2022		
					Target	Realisasi	Capaian
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	1. Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,2	1,25	1,21	96,80 %
		2. Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	10	11	12,05	100 %
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	2	3	100	100 %
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>98,93 %</b>

Dari rata-rata capaian kinerja diatas Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai **98,93 %** yang artinya masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**.

### 3.2 EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada tahun 2022, anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami *redesign* (perubahan), tidak terkecuali anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat *redesign* (perubahan) anggaran. Salah satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022 adalah kegiatan Bimtek Fortifikasi Garam Beryodium yang dapat ikut memberikan kontribusi pada sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Untuk melihat gambaran lebih rinci terkait capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dari tabel 3.2 di atas, dapat dianalisis sebagai berikut:

#### 1. SASARAN STRATEGIS SATU

<b>SASARAN STRATEGIS RPJMD</b>	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan
<b>SASARAN STRATEGIS RENSTRA</b>	Meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB
<b>INDIKATOR KINERJA 1</b>	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
<b>INDIKATOR KINERJA 2</b>	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Untuk meningkatkan kontribusi sektor industri dan perdagangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut:

##### 1.1 Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Industri Pengolahan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.136.316,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.252.596,07
<b>3</b>	<b>Industri Pengolahan</b>	<b>1.433.568,08</b>
4	Pengadaan Listrik dan Gas	101.368,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70.033,06
6	Konstruksi	12.112.974,14
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.300.187,69
8	Transportasi dan Pergudangan	5.746.708,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	741.294,71
10	Informasi dan Komunikasi	8.640.543,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.383.153,08
12	Real Estate	2.757.498,15
13	Jasa Perusahaan	178.664,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.218.709,92
15	Jasa Pendidikan	10.765.253,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.896.679,70
17	Jasa lainnya	1.982.648,11
	<b>Total PDRB</b>	<b>118.718.197,25</b>

Sumber Data: PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2022

Sehingga dari tabel di atas persentase kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2022 dapat dihitung dengan formula:

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut :

$$\frac{1.433.568,08}{118.718.197,25} \times 100\% = 1,21 \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	%	1,25	1,21	96,80

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.433.568,08 Juta atau sebesar 1,21 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 118.718.197,25 Juta sehingga realisasi lebih rendah 0,04 persen dari target yang ditetapkan sebesar 1,25 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke satu, sehingga persentase capaiannya sebesar 96,80 persen. Pada tahun 2022 ini terjadi perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

 Faktor Pendukung :

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus berusaha dalam meningkatkan Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan yang telah didukung oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:

- a. Ketersediaan sumber daya baik kalam maupun tenaga kerja potensial;
- b. Dukungan Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait untuk mengalokasikan dan menganggarkan program/kegiatan dalam rangka kapasitas produk dan pelaku industri antara lain :
  - Memberikan fasilitasi pengurusan perijinan usaha industri yang dapat mendukung pertumbuhan industri yang legal di Provinsi Nusa Tenggara Timur
  - Memberikan pelatihan dan bantuan peralatan yang mendukung berkembangnya usaha industri kecil dan menengah (IKM) yang berbasis teknologi industri
- c. Tersedianya akses pasar bagi produk daerah melalui berbagai *marketplace* baik secara *online* maupun *offline*;
- d. Menciptakan peluang kerja bagi para pencari kerja produktif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

 Faktor Penghambat :

Capaian indikator Persentase kontribusi Sektor Industri Pengolahan belum memenuhi target kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan karena pada perjalanannya terdapat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2022 dalam mencapai indikator kinerja ini. Dari hasil evaluasi, beberapa hambatan yang dihadapi dalam

mencapai sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut :

- a. Masih terbatasnya kemampuan industri kecil dan menengah terutama dalam hal penerapan standar mutu, penggunaan teknologi, pengembangan kreatifitas, inovasi dan diversifikasi produk;
- b. Pengolahan sumber daya alam belum optimal dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, masih banyak sumber daya alam dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikirim keluar daerah dalam bentuk bahan mentah;
- c. Masih banyak potensi kerjasama antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan perusahaan besar dan BUMN yang belum difasilitasi oleh pemerintah;
- d. Sarana dan prasarana teknologi industri berbasis pengolahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memadai.

 Solusi :

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki solusi diantaranya :

- a. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber daya industri;
- c. Membangun kemitraan dengan lembaga-lembaga pelatihan untuk menyelenggarakan pelatihan/bimbingan teknis baik bagi tenaga penyuluh industri maupun pelaku usaha.

 Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja :

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

 Program Program Perencanaan dan Pembangunan Industri :

Program ini didukung oleh kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

- i. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri :
  - a) Pengembangan Sentra dan Kawasan Industri

Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Flores Timur yang dibagi menjadi 2 tahap yaitu :

➤ Kegiatan Identifikasi

Identifikasi dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 23 s/d 24 Maret 2022 dan di Kabupaten Flores Timur pada tanggal 27 s/d 28 April 2022. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah pengumpulan data secara umum terdiri dari pengumpulan data primer berupa survei ke lokasi dan wawancara dengan narasumber/responden kabupaten terdiri dari instansi dan unit-unit terkait serta IKM yang akan terlibat dalam Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

➤ Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilaksanakan pada tanggal 29 November 2022 di Gedung Dekranasda, Provinsi NTT. Pihak-pihak yang ikut serta dalam FGD tersebut, antara lain: Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Selatan, Pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Flores Timur, Pejabat OPD terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Undangan/peserta lain, seperti Direktur Utama Kawasan Industri Bolok (KIB), serta Narasumber: Tenaga Ahli SIKM dari Jakarta, Pejabat dari Dinas ATR/PUPR Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil FGD menyatakan bahwa dari 4 (empat) calon lokasi yang diusulkan menjadi lokasi Sentra IKM, ada 3 (tiga) diantaranya memenuhi kriteria sebagai lokasi sentra, yang dituangkan dalam Dokumen Hasil FGD yang ditandatangani oleh stakeholder yang hadir. Ketiga lokasi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Sentra IKM Lewokluok, Kab. Flores Timur** : Pada sentra ini sebagai IKM Penggerak adalah IKM Tenun. Kegiatan IKM Tenun terkait dengan beberapa kegiatan lainnya, seperti penyediaan bahan baku benang, pewarna, pengrajin pembuat motif (desainer) penjahit dan pemasaran.

- **Sentra IKM Fatumnasi dan Sentra IKM Ajaobaki, Kab. Timor Tengah Selatan** : Pada sentra ini sebagai IKM Penggerak adalah IKM Pembotolan Madu. Kegiatan IKM pembotolan madu terkait dengan beberapa kegiatan lainnya, seperti penyediaan bahan baku madu alam, supplier botol, pengrajin pembuat stiker merk dan pemasaran.
- b) Pengembangan Kerajinan Bambu
- Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Koanara, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende pada tanggal 19 s/d 23 April 2022. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 10 orang anggota kelompok kerajinan Bambu di Kabupaten Ende. Pelatihan dilaksanakan ke dalam 2 (dua) bentuk kegiatan yaitu pemahaman teori (20%) untuk meningkatkan wawasan peserta dan praktek (80%) untuk pembuatan produk kerajinan bambu berupa lampion, kap lampu dan gantungan kunci. Pada kegiatan ini juga diberikan bantuan peralatan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengembangan kerajinan bambu.
- ii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri :
- a) Fasilitas HKI Merek
- Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang pada tanggal 17 s/d 19 Maret 2022. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 (tiga puluh) orang binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, serta 2 (dua) orang pendamping dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT. Hasil yang diperoleh melalui kegiatan ini adalah terdaftarnya merk 30 IKM yang berasal dari Kota/Kabupaten yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT.
- b) Fasilitas HKI Paten
- Kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Sikka dan Flores Timur pada tanggal 21 s/d 23 April 2022 dengan tujuan memberikan bantuan pengurusan Sertifikasi Paten bagi SMK Negeri 1 Maumere (Kab. Sikka) dan IKM Ria's Bag (Kab. Flores Timur). Pada SMK Negeri 1 Maumere teridentifikasi 4 buah mesin yang direncanakan akan dipatenkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT yakni

Mesin Kupas Sabut Kelapa, Mesin Kupas Batok Kelapa, Mesin Parut Kelapa, dan Mesin Press Santan Kelapa. Sedangkan, di IKM Ria's Bag teridentifikasi 1 buah alat pengiris daun lontar.

iii. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri :

a) Pengembangan Industri Pakan Ternak

Kegiatan Bimtek Pengolahan Pakan Ternak bagi Kelompok IKM Pakan Ternak ini dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah peserta 10 (sepuluh) orang.

b) Fasilitasi Sertifikasi Halal

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka failitasi bagi pemenuhan legalitas dan standardisasi industri khususnya Sertifikat Halal di Kabupaten Alor pada tanggal 3 s/d 6 Agustus 2022, Sikka pada tanggal 2 s/d 5 Agustus 202 dan Sabu Raijua pada tanggal 27 s/d 30 Juli 2022. Hasil yang didapat dari kegiatan ini adalah Sebanyak 15 (lima belas) pelaku IKM (5 IKM per Kabupaten) mendapatkan sertifikat Halal sehingga produk dihasilkannya dapat dipasarkan di toko, swalayan ataupun supermarket yang ada di NTT.

iv. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat :

a) Pengembangan Alat Mesin Pakan Ternak

Kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan Mesin Pencacah Pakan Ternak bagi Kelompok Tani/Ternak sebanyak 169 Unit yang tersebar di 13 Kab/ Kota.

Tabel 3.5 Alokasi Bantuan Mesin Pencacah Pakan Ternak Tahun 2022

No	Lokasi (Kota/kab)	Jumlah Bantuan (Unit)
1	Kota Kupang	4
2	Kab. Kupang	19
3	Timor Tengah Selatan	33
4	Timor Tengah Utara	9
5	Belu	16
6	Malaka	5
7	Lembata	4
8	Flores Timur	15
9	Manggarai Barat	28

No	Lokasi (Kota/kab)	Jumlah Bantuan (Unit)
10	Sumba Barat Daya	6
11	Sumba Barat	3
12	Sumba Tengah	18
13	Sumba Timur	9
	<b>Total</b>	<b>169</b>

b) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (POKIR)

Kegiatan ini merupakan perwujudan dari Pokok Pikiran Dewan yang berupa pemberian bantuan mesin/peralatan bagi kelompok IKM dan usaha ekonomi produktif di 15 Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Alokasi Bantuan Pokir Tahun 2022

No.	Jenis Bantuan	Lokasi (Kota/Kab)	Jumlah (unit)
1	Alat Tenun Bukan Mesin	Kota Kupang	13
		TTS	3
		TTU	8
		Ngada	3
		Manggarai Barat	1
		Sumba Barat Daya	5
2	Gerobak Dorong	Kota Kupang	11
		Ngada	2
		Sumba Barat Daya	2
		Sumba Barat	8
3	Mesin Destilasi Minuman Beralkohol	Kab. Kupang	1
		TTS	1
		Nagekeo	1
4	Mesin Pemecah Kemiri	Ende	2
5	Mesin/Peralatan Pakan Ternak	Kab. Kupang	3
		TTS	2
		Belu	1
		Flores Timur	1
		Sikka	1
		Nagekeo	1
		Ngada	1
		Manggarai Timur	1
Manggarai	1		

No.	Jenis Bantuan	Lokasi (Kota/Kab)	Jumlah (unit)
6	Tenda Payung	Kota Kupang	44
		Kab. Kupang	1
		TTS	11
		Sikka	4
		Ngada	1
		Manggarai Barat	3
		Sumba Barat	22
	<b>Total</b>		<b>159</b>

✿ Program Pengendalian Izin Usaha Industri :

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi :

a) Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Industri

Kegiatan pengawasan legalitas usaha industri ini dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Kabupaten Belu pada tanggal 17 s/d 20 Maret 2022, Kabupaten Flores Timur pada tanggal 07 s/d 09 April 2022, Kabupaten Sikka pada tanggal 10 s/d 12 April 2022, dan Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 15 s/d 18 April 2022. Pengawasan dilakukan pada Industri Pengolahan Pangan dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

✿ Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional :

Program ini didukung oleh Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

i. Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) :

a) Penyusunan Data dan Informasi Industri dan Data Izin Industri

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesesuaian data dan informasi yang tersedia dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada 4 Kab/Kota yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai barat, Ngada dan Sumba Timur.

## 1.2 Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Perdagangan)

No	Lapangan Usaha	PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
		2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	35.136.316,46
2	Pertambangan dan Penggalian	1.252.596,07
3	Industri Pengolahan	1.433.568,08
4	Pengadaan Listrik dan Gas	101.368,67
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	70.033,06
6	Konstruksi	12.112.974,14
<b>7</b>	<b>Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</b>	<b>14.300.187,69</b>
8	Transportasi dan Pergudangan	5.746.708,45
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	741.294,71
10	Informasi dan Komunikasi	8.640.543,22
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.383.153,08
12	Real Estate	2.757.498,15
13	Jasa Perusahaan	178.664,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	15.218.709,92
15	Jasa Pendidikan	10.765.253,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.896.679,70
17	Jasa lainnya	1.982.648,11
	<b>Total PDRB</b>	<b>118.718.197,25</b>

Sumber Data : PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha BPS Provinsi NTT Tahun 2022

Sehingga dari tabel di atas persentase kontribusi perdagangan terhadap PDRB ADH Berlaku tahun 2022 dapat dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut :

$$\frac{14.300.187,69}{118.718.197,25} \times 100\% = 12,05 \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 Indikator 2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	11	12,16	100

Kontribusi sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 3.698.831,65 Juta atau sebesar 12,16 persen dari total PDRB – ADHB yang tercatat sebesar Rp. 30.417.526,96 Juta sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan sebesar 11 persen, sebagaimana pada sasaran strategis satu, indikator kinerja ke dua, sehingga persentasenya sebesar 100 persen. Pada tahun 2022 ini terjadi perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

 Faktor Pendukung :

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 ditopang oleh tetap kuatnya kinerja sebagian besar lapangan usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun pertumbuhan tersebut selain di topang oleh Industri Pengolahan, juga ditopang oleh sektor perdagangan. Pertumbuhan pada Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor didorong oleh masih positifnya penjualan kendaraan bermotor. Dengan didukung kemajuan teknologi, perdagangan juga semakin meningkat mengingat sudah banyak *platform* penjualan *online* yang di gunakan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk memperdagangkan usaha mereka.

 Faktor Penghambat :

Melambatnya pertumbuhan Perdagangan ini sejalan dengan kinerja konsumsi rumah tangga Provinsi Nusa Tenggara Timur yang juga tercatat melambat yang di pengaruhi oleh meningkatnya standar harga barang kebutuhan pokok dan barang penting pada saat-saat tertentu dikarenakan kelangkaan barang.

■ Solusi :

Untuk mengatasi kendala – kendala diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki solusi diantaranya :

- a. Meningkatkan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi pada Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor. dan pengembangan sumber daya Lapangan Usaha Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor;
- c. Fasilitasi pengembangan akses pasar dengan memanfaatkan berbagai jenis *platform* penjualan baik secara online maupun offline.

■ Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja :

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

✚ Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting :

Program ini didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

- i. Koordinasi Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
  - a) Pasar Murah Bersubsidi

Kegiatan Pasar Murah Bersubsidi ini dilaksanakan sebagai langkah penanggulangan terjadinya inflasi pada tahun 2022. Pada Pasar Murah Bersubsidi diberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan dan terkena dampak inflasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 8 Kab/Kota dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.9 Alokasi Paket Sembako pada Kegiatan Pasar Murah

No.	Lokasi	Jumlah Paket
1	Alor	1000
2	Sikka	966
3	Sumba Timur	1000
4	TTS	1049
5	Kota Kupang	1500
6	Ngada	1000

No.	Lokasi	Jumlah Paket
7	Ende	1000
8	Belu	1000

- ii. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota:
- a) Data Informasi Perdagangan Dalam Negeri (PROGNOSA)
- Kegiatan ini dilaksanakan dengan maksud menyediakan data informasi harga dan stok Bahan pokok dan Barang Penting yang ada di 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Alor, Belu, Flores Timur, Lembata, Malaka, Sikka, TTS, TTU dan Kota Kupang.
- iii. Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi :
- a) Pengambilan Data Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
- Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara periodik sehingga dapat mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal. Tolak ukur perhitungan kenaikan harga setiap tahun ini adalah pada jenis-jenis inflasi berdasarkan dampak ekonomi yaitu :
- ⇒ Inflasi ringan yaitu inflasi yang mudah untuk dikendalikan dan belum begitu mengganggu perekonomian suatu negara. Terjadi kenaikan harga barang/jasa secara umum, biasanya di bawah 10% per tahun dan dapat dikendalikan;
  - ⇒ Inflasi sedang yaitu Inflasi tingkat ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpenghasilan tetap, tetapi belum membahayakan aktivitas perekonomian negara. Inflasi sedang berada di kisaran kenaikan harga 10% – 30% per tahun;
  - ⇒ Inflasi berat yaitu inflasi yang bisa mengakibatkan kekacauan perekonomian di suatu negara. Kondisi ini umumnya membuat masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung karena bunganya jauh lebih rendah ketimbang nilai inflasi. Kenaikan harga sebab inflasi ini ada di besaran 30%–100% per tahun;

⇒ Inflasi sangat berat (*Hyperinflation*) yaitu Di tingkat inflasi ini telah mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Inflasi ini berada di kisaran 100% ke atas per tahun.

Dengan demikian rata-rata persentase kenaikan harga setiap tahun harus dipastikan berada di bawah 10% sehingga dapat dikategorikan masih stabil dan terkendali. Data harga diambil bersifat real time harian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan. Hasil perhitungan rata-rata kenaikan atau penurunan barang kebutuhan pokok dan barang penting selama tahun 2022 sebagai berikut :

✓ Bahan Kebutuhan Pokok

Data rata-rata kenaikan/penurunan harga kebutuhan pokok sebagai berikut :

Tabel 3.10 Kenaikan/penurunan Harga Bahan Kebutuhan Pokok

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Selisih Harga	Presentase (%)
1	Beras	kg	10.143	10.338	194	1,92%
2	Gula Pasir	kg	14.011	15.363	1.352	9,65%
3	Minyak Goreng	ltr	14.913	20.679	5.766	38,67%
4	Tepung Terigu	kg	9.846	9.967	121	1,23%
5	Daging Sapi	kg	89.167	95.448	6.282	7,04%
6	Daging Ayam	kg	58.348	55.000	-3.348	-5,74%
7	Telur	kg	45.548	47.608	2.061	4,52%
8	Cabe Merah	kg	48.960	56.149	7.189	14,68%
9	Cabe Rawit	kg	55.809	46.486	-9.323	-16,71%
10	Bawang Merah	kg	27.228	33.211	5.983	21,97%
11	Bawang Putih	kg	31.560	37.458	5.898	18,69%
12	Susu	gr/kl	32.285	25.000	-7.285	-22,57%
13	Garam Beryodium	kg	10.000	10.000	0	0,00%
14	Kacang Kedelai	kg	12.953	12.000	-953	-7,36%
15	Kacang Tanah	kg	28.175	30.000	1.825	6,48%
16	Kacang Hijau	kg	26.604	30.000	3.396	12,76%
17	Mie Instan Kari Ayam	bks	2.593	2.500	-93	-3,58%
18	Ikan Asin Teri	kg	92.311	79.356	-12.955	-14,03%
19	Ketela Pohon	kg	10.000	10.000	0	0,00%
20	Ikan Kembung	kg	40.946	25.000	-15.946	-38,94%

No	Nama Bahan Pokok	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Selisih Harga	Presentase (%)
21	Ikan Tongkol/ Tuna/Cakalang	kg	41.370	40.000	-1.370	-3,31%
22	Jagung Pipilan Kering (Untuk Pangan, Bukan Untuk Pakan)	kg	7.573	9.716	2.143	28,30%
<b>Rata-rata :</b>						<b>2,44%</b>

*Keterangan :*

- Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis bahan pokok
- Tanda (-) minus menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu
- Tanda (+) plus menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu

Dari data di atas bisa dilihat bahwa ada kenaikan harga pada bahan pokok dengan persentase rata-rata sebesar 2,44%. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan minyak goreng sehingga terjadi kenaikan harga yang cukup besar pada tahun 2022, serta adanya kenaikan harga pada waktu peringatan hari raya keagamaan. Namun kenaikan harga ini bisa dikendalikan dan tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat, situasi jual-beli di pasar-pasar tradisional tetap kondusif serta daya beli masyarakat tetap tinggi.

✓ **Barang Penting**

Data rata-rata kenaikan/penurunan harga barang penting sebagai berikut :

Tabel 3.11 Kenaikan/Penurunan Harga Barang Penting

No.	Barang Penting	Satuan	Tahun		Selisih Harga	Presentase (%)
			2021	2022		
1	Semen	sak	48.590	48.833	243	0,50%
2	Besi Beton	Batang	136.276	153.854	17.579	12,90%
3	Tripleks	Lembar	67.165	64.396	-2.769	-4,12%
4	Kayu Balok	Batang	60.625	60.521	-104	-0,17%
5	Kayu Papan	Lembar	78.144	60.000	-18.144	-23,22%
6	Paku	kg	20.125	20.535	410	2,04%
7	Pupuk Subsidi	kg	2.060	1.890	-170	-8,27%
8	Pupuk Non Subsidi	kg	10.917	14.117	3.200	29,31%
9	Seng	Lembar	64.983	71.792	6.808	10,48%
10	Bajadek	Lembar	217.530	203.653	-13.877	-6,38%
11	Elpiji	Kg	145.000	174.333	29.333	20,2%3
12	Baja Ringan	Batang	96.833	98.178	1.345	1,39%
13	Benih	Kg	12.500	12.500	0	0,00%
<b>Rata-rata :</b>						<b>2,67%</b>

*Keterangan :*

- Harga di atas merupakan harga rata-rata per jenis barang penting
- Tanda (-) minus menunjukkan adanya penurunan harga dibandingkan dengan tahun lalu
- Tanda (+) plus menunjukkan adanya kenaikan harga dibandingkan dengan tahun lalu

Dari data di atas, kenaikan harga rata-rata barang penting tahun 2022 mencapai 2,67%. Namun kenaikan harga ini tidak terlalu berdampak pada perekonomian masyarakat, situasi jual-beli tetap kondusif serta daya beli masyarakat tetap tinggi. Salah satu faktor yang mempengaruhi kenaikan harga pada tahun 2022 ini adalah naiknya harga tabung gas elpiji sebagai akibat dari kenaikan harga minyak goreng dan gas dunia.

iv. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya :

a) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi agar terjamin kelancaran pengadaan dan penyalurannya bagi para kelompok tani berdasarkan prinsip 6 (enam) Tepat yaitu Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu dan Mutu. Kegiatan ini dilaksanakan di 7 (tujuh) Kab/Kota yakni di Kota Kupang, Kab. Kupang, TTU, Belu, Malaka, Manggarai dan Sumba Barat Daya.

✚ Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen :

Program ini didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

i. Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen :

a) Edukasi Konsumen

Maksud dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen serta pelaku usaha juga dapat memahami tentang setiap regulasi yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 lokasi yaitu Kabupaten Belu pada tanggal 23 Juni 2022 dan Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 10 Februari 2022. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 35 orang peserta di masing-masing kabupaten. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian dari narasumber berupa materi secara panel. Narasumber berasal dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dan Kabupaten.

ii. Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen :

a) Pengawasan makanan ,minuman dan obat-obatan kadaluarsa

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meminimalisir peredaran dan penjualan produk makanan dan minuman yang telah kadaluarsa di pasaran sehingga konsumen dapat terlindungi. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kab/Kota yaitu, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Lembata, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai Barat, Sikka dan Kota Kupang. Dari total keseluruhan 113 pelaku usaha terdapat 70 pelaku usaha yang memenuhi standar.

b) Pengawasan Barang Wajib SNI, Label Petunjuk Manual dan Kartu Garansi

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk memastikan kesesuaian barang dan jasa dalam memenuhi standar mutu produk barang dan jasa khususnya melalui parameter penandaan dan pencantuman label pada barang dan kemasan. Kegiatan ini dilaksanakan di 10 Kab/Kota yaitu, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Lembata, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai Barat, Sikka dan Kota Kupang. Dari total keseluruhan 94 pelaku usaha terdapat 50 pelaku usaha yang memenuhi standar.

iii. Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen :

a) Pengawasan Khusus

Maksud dari kegiatan Pengawasan Khusus Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ini adalah melakukan pembinaan serta menegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pelaku usaha yang dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan pelanggaran hukum dibidang perlindungan konsumen dan tertib niaga khususnya terhadap gudang penyimpanan. Tempat pelaksanaan kegiatan pengawasan khusus ini berada di 4 (empat) lokasi yang terdiri dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Belu. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan melaksanakan koordinasi, konsultasi serta pengumpulan data dan informasi terkait temuan yang merupakan hasil evaluasi pengawasan berkala di tingkat kabupaten/kota sepanjang tahun 2022 dan apabila ditemukan unsur-

unsur pidana akan ditindaklanjuti dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung ke sarana usaha pelaku usaha.

✚ Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk :

Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

i. Pengembangan Layanan Pengujian

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pengujian sampel pada UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Kegiatan pengambilan sampel pada tahun 2022 telah dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten selama bulan maret s/d bulan desember dengan rincian sebagai berikut :

- Kabupaten Sumba Barat Daya : Dilaksanakan pengambilan sampel pada 3 (tiga) pelaku usaha berupa sampel biji kopi (Robusta).
- Kabupaten Sumba Timur : Dilaksanakan pengambilan sampel pada 3 (tiga) pelaku usaha berupa sampel Kemiri, Kopra dan Mete.
- Kabupaten Alor : Dilaksanakan pengambilan sampel pada 1 (satu) pelaku usaha berupa sampel biji kopi (Robusta).

ii. Pengembangan Layanan Kalibrasi

Pada tahun 2022, UPTD PSMB telah melakukan kalibrasi terhadap alat-alat yang dimiliki oleh beberapa Badan Usaha dengan alat ukur berjumlah 33 buah. Berikut data badan usaha yang telah melakukan kalibrasi pada UPTD PSMB :

Tabel 3.12 Badan Usaha Yang Telah Melakukan Kalibrasi

No.	Nama Pemilik/Pemakai	Alamat	Jenis Alat
1	CV AGAR KEMBANG	Kab. Kupang	Timbangan Elektronik
2	CV AGAR KEMBANG	Kab. Kupang	Timbangan Pegas
3	DINAS KESEHATAN PROVINSI NTT	Kota Kupang	Pengukuran Tinggi Badan Bayi
4	PT. RAMAYANA	Kab. TTU	Timbangan Elektronik
5	PT. JAYA KONSTRUKSI	Kab. Kupang	Timbangan AMP (2 buah)
6	PT. JAYA KONSTRUKSI	Kab. Kupang	Timbangan Triple Beam (4 buah)
7	PT. JAYA KONSTRUKSI	Kab. Kupang	Timbangan Elektronik (3 buah)

No.	Nama Pemilik/Pemakai	Alamat	Jenis Alat
8	PT. JAYA KONSTRUKSI	Kab. Kupang	Termometer (3 buah)
9	CV. CIPTA TITRA MANDIRI	Kab. Belu	Jangka Sorong
10	CV. CIPTA TITRA MANDIRI	Kab. Belu	Timbangan Elektronik (2 buah)
11	PT. DIAN NUSA LESTARI	Kab. Belu	Timbangan Elektronik (3 buah)
12	PT. PUNDI MAS BAHAGIA	Kab. Belu	Timbangan Elektronik (2 buah)
13	PT. DIAN NUSA LESTARI	Kab. Belu	Alat Uji Tekan / CBR TEST (2 buah)
14	PT. PUNDI MAS BAHAGIA	Kab. Belu	Alat Uji Tekan / CBR TEST (2 buah)
15	PT. PUNDI MAS BAHAGIA	Kab. Belu	Flow meter
16	PT. ADITIA FARMATAMA	Kota Kupang	TERMOMETER / HYGROMETER
17	PT. HEPY JAYA ABAD	Kab. TTU	Timbangan Elektronik (3 buah)

✿ Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri :

Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

- i. Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi :  
Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian Hibah sebesar Rp. 3.350.000.000, - kepada DEKRANASDA Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk meningkatkan transaksi dan jaringan pemasaran produk daerah.
- ii. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri :
  - a) Pelatihan Pemasaran *Online* :  
Kegiatan Pelatihan Pemasaran *Online* ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan pemasaran produk unggulan Daerah hasil usaha para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur secara *online*. Pelatihan ini dilaksanakan di 2 lokasi sebagai berikut :
    - Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 09 s/d 10 Februari 2022 bertempat di Hotel Dena, So'e dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).
    - Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 22 s/d 23 Juni 2022 bertempat di Hotel Casa Kandara, Waingapu dengan jumlah

peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Narasumber pada pelatihan ini adalah Bapak Beny Leonard yang merupakan seorang Praktisi Digital. Pada pelatihan ini diajarkan bagaimana menggunakan aplikasi Canva untuk membuat tampilan produk lebih menarik dan bagaimana mempromosikan produk-produk yang ada melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram.

## 2. SASARAN STRATEGIS SATU

<b>SASARAN STRATEGIS RPJMD</b>	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional
<b>SASARAN STRATEGIS RENSTRA</b>	Meningkatnya nilai ekspor
<b>INDIKATOR KINERJA 1</b>	Persentase peningkatan nilai ekspor

Untuk meningkatkan nilai ekspor dalam mendukung perananan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perdagangan Regional, maka ditetapkan sasaran strategis yang pertama, yaitu Meningkatnya nilai ekspor. Dalam sasaran strategis yang pertama ini, terdapat 1 (Satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat diukur dengan rumusan/formula tertentu, adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya, akan diuraikan sebagai berikut :

### 2.1 Persentase Peningkatan Nilai Ekspor

Nilai Ekspor Nonmigas Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13 Nilai Ekspor non migas (US \$) Tahun 2021 - 2022

No	Tahun	Nilai Ekspor nonmigas (US \$)
1.	2021	15.629.040,00
2.	2022	46.596.605,00

Sehingga dari tabel di atas Persentase peningkatan nilai ekspor tahun 2022 dapat dihitung dengan formula :

$$\frac{\text{Nilai Ekspor Tahun } n - \text{Nilai Ekspor Tahun } (n - 1)}{\text{Nilai Ekspor Tahun } n} \times 100\%$$

Dari data yang ada kemudian dapat dihitung realisasi indikator kinerja menjadi sebagai berikut :

$$\frac{46.596.605,00 - 15.629.040,00}{15.629.040,00} \times 100\% = 198,14 \%$$

Maka Indikator dan Capaian target kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.14 Pencapaian Kinerja Sasaran 2 Indikator 1

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase peningkatan nilai ekspor	%	3	100	100

Persentase peningkatan nilai ekspor dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 adalah sebesar US\$ 30.967.565,00 atau sebesar 198,14 persen sehingga realisasi jauh melebihi target yang ditetapkan sebesar 3 persen, sebagaimana pada sasaran strategis dua, indikator kinerja ke satu, sehingga persentasenya tetap dihitung sebesar 100 persen. Pada tahun 2022 ini terjadi perubahan pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga tidak memiliki perbandingan dengan tahun sebelumnya.

**■ Faktor Pendukung :**

Komoditas terbesar ekspor NTT adalah komoditas non migas. Komoditas ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dimuat melalui pelabuhan di Nusa Tenggara Timur seluruhnya dikirim ke Timor Leste. Selain ekspor melalui pelabuhan di NTT, ekspor komoditas asal NTT juga dilakukan melalui pelabuhan di luar NTT. Tercatat total ekspor ke 13 negara tujuan pada 2022 yaitu Timor Leste, Vietnam, Filipina, Denmark, France, Germany, China, India, Republic of Korea, United States, Taiwan, Japan dan Australia. Kondisi peningkatan nilai ekspor tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekspor ke beberapa negara utama. Pada Tahun 2022, Timor Leste masih merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar dengan nilai ekspor, diikuti China, dan Vietnam.

Dari sisi pertumbuhan, selama Januari–Desember Tahun 2022 ekspor 10 Kelompok komoditas naik 201,34 persen terhadap periode yang sama tahun 2021. Nilai Ekspor Sepuluh Kelompok Komoditas Non Migas NTT, Januari–Desember 2022 sebagai berikut:

Kelompok Komoditas	Nilai FOB (US\$)		Perubahan		Nilai FOB (US\$)		Perubahan (%)	Peran Thd Jan-Des 2022 (%)
	2022				Januari-Desember			
	Nov	Des	Nilai	%	2021	2022		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Minuman (22)	863.362	829.075	-34.287	-3,97	1.000.916	5.132.393	412,77	11,01
Perabot, Penerangan Rumah (94)	315.526	684.534	369.008	116,95	2.071.480	4.546.541	119,48	9,76
Susu, Mentega, Telur (04)	417.327	465.158	47.831	11,46	1.073.762	3.677.159	242,46	7,89
Olahan dari Tepung (19)	336.819	322.789	-14.030	-4,17	382.514	3.822.051	899,19	8,20
Garam, Belerang, Kapur (25)	263.935	252.624	-11.311	-4,29	1.991.506	2.819.212	41,56	6,05
Kendaraan dan Bagiannya (87)	264.675	244.620	-20.055	-7,58	1.330.545	2.736.927	105,70	5,87
Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian (33)	275.549	211.410	-64.139	-23,28	1.570.566	2.440.550	55,39	5,24
Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (84)	182.568	187.135	4.567	2,50	663.802	5.212.088	685,19	11,19
Berbagai Makanan Olahan (21)	199.926	181.280	-18.646	-9,33	257.855	988.509	283,36	2,12
Sabun dan Preparat Pembersih (34)	132.812	156.397	23.585	17,76	477.635	1.231.649	157,86	2,64
<b>Total 10 Kelompok Komoditas</b>	<b>3.252.499</b>	<b>3.535.022</b>	<b>282.524</b>	<b>8,69</b>	<b>10.820.581</b>	<b>32.607.078</b>	<b>201,34</b>	<b>69,98</b>
Lainnya	2.030.816	1.498.387	-532.429	-26,22	4.808.458	13.989.527	190,94	30,02
<b>Total Eskpor Non Migas</b>	<b>5.283.315</b>	<b>5.033.409</b>	<b>-249.905</b>	<b>-4,73</b>	<b>15.629.039</b>	<b>46.596.604</b>	<b>198,14</b>	<b>100,00</b>

Sumber Data : BPS Provinsi NTT, 2022

Selama Tahun 2022, ekspor nonmigas Nusa Tenggara Timur jauh meningkat dibanding periode yang sama pada 2021. Hal ini dikarenakan seiring dengan pemulihan kondisi perekonomian mitra dagang utama Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama Timor Leste. Hal tersebut menunjukkan pemulihan perekonomian dari efek pandemi COVID-19 yang sempat menghambat pertumbuhan ekspor di Tahun 2021.

#### ■ Faktor Penghambat :

Faktor penghambat Ekspor adalah :

1. Masih minimnya informasi serta perkembangan pasar potensial bagi produk ekspor daerah pada negara tujuan ekspor yang diperoleh para eksportir di dalam daerah.
2. Masih kurangnya sinergitas dan kerjasama dengan pihak-pihak lain yang terkait dalam upaya peningkatan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### ■ Solusi :

Solusi yang dilakukan dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan eksportir, kerjasama, dan pengawasan terhadap eksportir.

2. Mengembangkan sarana dan prasarana eksportir.
3. Mendorong IKM agar dapat mengekspor produknya guna perluasan pasar produknya.

 Kegiatan Pendukung Pencapaian Indikator Kinerja :

Dalam mendukung pencapaian realisasi target kinerja dari sasaran strategis ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjalankan Program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan :

Program ini didukung oleh kegiatan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API), dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

i. Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

Melalui kegiatan ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur melayani fasilitasi kepada pelaku usaha ekspor untuk dapat menerbitkan Surat Keterangan Asal (SKA). Berikut data ekspor berdasarkan penerbitan SKA/COO pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Data EKSPOR  
Berdasarkan Penerbitan Dokumen SKA/COO  
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT

No	Nama Komoditi	Negara Tujuan	Nilai Ekspor (USD)	Volume Ekspor (Kg)	Pelaku Ekspor	Tanggal Dokumen
1	Rumput laut dalam bentuk chips	China	193,849,196.00	28,000.00	PT. ASTIL	6 Januari 2022
2	Ikan Tuna Beku	Thailand	768,000,000.00	51,376.00	PT. Sumber Rejeki Berkah Lautan Indonesia	7 Januari 2022
3	Kopi Bubuk	Timor Leste	7,798.00	101,798.00	CV. BETA TIMOR	19 Januari 2022
4	Kopi Bubuk	Timor Leste	4,098.00	4,098.00	CV. BETA TIMOR	31 Januari 2022
5	Kopi Bubuk	Timor Leste	4,100.00	4,098.00	CV. BETA TIMOR	4 Februari 2022
6	Kopi Bubuk	Timor Leste	2,050,000.00	4,070.00	CV. BETA TIMOR	1 Maret 2022
7	Frozen Skipjack Tuna Whole Round	Thailand	36,882,000.00	27,000.00	PT. Sumber Rejeki Berkah Lautan Indonesia	07 April 2022
8	Kopi Bubuk	Timor Leste	12,300,000.00	15,000.00	CV. BETA TIMOR	20 April 2022
9	Kopi Bubuk	Timor Leste	13,418,000.00	1,250.00	CV. BETA TIMOR	23 Mei 2022
10	Kopi Bubuk	Timor Leste	156,550,000.00	1,348.00	CV. BETA TIMOR	6 Juni 2022
11	Kopi Bubuk	Timor Leste	11,927,000.00	753,000.00	CV. BETA TIMOR	15 Juni 2022
12	Tepung Rumput Laut	Denmark	239,000,000.00	20,000.00	Rote Karaginan Nusantara	22 Juli 2022
13	Tepung Rumput Laut	Australia	51,000,000.00	945,000.00	Rote Karaginan Nusantara	28 Juli 2022
14	Kopi Bubuk	Timor Leste	10,281,000.00	13,847,000.00	CV. BETA TIMOR	12 Agustus 2022
15	Kopi Bubuk	Timor Leste	13,633,000.00	585,000.00	CV. BETA TIMOR	12 Agustus 2022
16	Tepung Rumput Laut	Brazil	284,900,000.00	22,000.00	Rote Karaginan Nusantara	11 Oktober 2022
17	Tepung Rumput Laut	Rusia	257,400,000.00	22,000.00	Rote Karaginan Nusantara	01 November 2022
18	Batu alam kerikil	Korea Selatan	19,170,000.00	120,000.00	CV. Rahmad Raya	23 November 2022
19	Batu alam kerikil	Korea Selatan	8,025,000.00	52,000,000.00	CV. Rahmad Raya	29 November 2022
20	Batu alam kerikil	Korea Selatan	3,215,000.00	24,000,000.00	CV. Rahmad Raya	29 November 2022
21	Batu alam kerikil	Korea Selatan	8,025,000.00	52,000,000.00	CV. Rahmad Raya	01 Desember 2022
22	Batu alam kerikil	Korea Selatan	8,805,000.00	52,000,000.00	CV. Rahmad Raya	07 Desember 2022
23	Batu alam kerikil	Korea Selatan	5,675,000.00	24,600,000.00	CV. Rahmad Raya	22 Desember 2022
24	Batu alam kerikil	Korea Selatan	5,675,000.00	24,600,000.00	CV. Rahmad Raya	28 Desember 2022
			2,109,796,192			

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, 2022

🌐 Program Pengembangan Ekspor :

Program ini didukung oleh kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah

Kabupaten/Kota dalam Provinsi, dengan didukung oleh beberapa sub kegiatan prioritas sebagai berikut :

i. Peningkatan Citra Produk Ekspor :

Untuk meningkatkan jumlah produk unggulan ekspor yang bernilai tambah maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun materi promosi berbentuk katalog produk unggulan ekspor dari pelaku usaha yang dibina. Berikut produk-produk yang telah disusun menjadi katalog promosi :

- ✓ Pernak Pernik Tenun
- ✓ Moringa Crispy Cheese (produksi dari La Moringa)
- ✓ Jahe Merah (produksi dari Almetira)
- ✓ Gluten Free Sorghum Moringa Biscuits (produksi dari Triple Girl)
- ✓ Kunyit Asam (produksi dari Almetira)
- ✓ Abon Tuna Loin (produksi dari Dapoer Panbers)
- ✓ Madu Hutan NTT (produksi dari An Nahl)
- ✓ Batok Arang Kelapa (produksi dari Dyvo Multi Sejahtera)
- ✓ Teh Celup Kelor (produksi dari La Moringa)
- ✓ Bolelebo Enting Lepa khas NTT (produksi dari Lontar Utama)
- ✓ Sombra Coffee
- ✓ Bolelebo Sambal Asli NTT (produksi dari Lontar Utama)
- ✓ Chocolate Ghaura (produksi dari PT. Ghaura Cokelat Indonesia)

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

#### 3.3.1 Anggaran bersumber dari APBD

Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat total anggaran dari APBD (setelah perubahan) sebesar **Rp. 18.821.831.170,-** (Delapan belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 17.555.022.828,-** (Tujuh belas miliar lima ratus lima puluh lima juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) atau (93,27%), dengan rincian realisasi anggaran per program kegiatan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.15  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBD TA 2022

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi		
			Rp.	Fisik %	Keu%
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	9.795.089.830,-	8.737.714.667,-	100	89,21
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	20.840.400,-	20.324.000,-	100	97,52
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	1.333.545.540,-	1.278.081.382,-	100	95,84
4.	Pengembangan Ekspor	32.169.800,-	30.049.600,-	100	93,41
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	343.056.100,-	298.627.740,-	100	87,05
6.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.406.301.000,-	3.404.459.700,-	100	99,95
7.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	3.789.845.600,-	3.702.478.071,-	100	97,69
8.	Pengendalian Izin Usaha Industri	57.328.100,-	45.680.930,-	100	79,68
9.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	43.654.800,-	37.606.738,-	100	86,15
	<b>Total :</b>	<b>18.821.831.170,-</b>	<b>17.555.022.828,-</b>	<b>100</b>	<b>93,27</b>

Rincian realisasi belanja yang bersumber dari APBD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.16  
Rincian Realisasi Belanja APBD TA 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
			(Rp.)	Keu (%)
<b>TOTAL ANGGARAN TAHUN 2022</b>		<b>18.821.831.170</b>	<b>17.555.022.828</b>	<b>93,27</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>9.795.089.830</b>	<b>8.737.714.667</b>	<b>89,21</b>
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.696.150	161.941.790	89,62
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.033.884.900	6.094.066.928	86,64
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.775.900	7.775.900	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.945.700	193.361.179	95,28
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.350.200	26.295.900	99,79
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.101.788.580	2.077.062.980	98,82

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	Keu (%)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		241.648.400	177.209.990	73,33
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>		<b>20.840.400</b>	<b>20.324.000</b>	<b>97,52</b>
1	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)		20.840.400	20.324.000	97,52
<b>III</b>	<b>PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING</b>		<b>1.333.545.540</b>	<b>1.278.081.382</b>	<b>95,84</b>
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi		1.191.675.940	1.140.007.092	95,66
	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	1.191.675.940	1.140.007.092	95,66
2	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		110.254.800	107.965.700	97,92
	2.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Dstribusi Barang Lintas Kab/Kota	41.550.200	39.261.100	94,49
	2.2	Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Kab/Kota dalam 1 Provinsi	68.704.600	68.704.600	100
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran, dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya		31.614.800	30.108.590	95,24
	3.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	31.614.800	30.108.590	95,24
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>		<b>32.169.800</b>	<b>30.049.600</b>	<b>93,41</b>
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Unggulan yang Terdapat pada lebih dari 1 Daerah Kab/Kota dalam Provinsi		32.169.800	30.049.600	93,41
	1.1	Peningkatan Citra Produk ekspor	32.169.800	30.049.600	93,41
<b>V</b>	<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>		<b>343.056.100</b>	<b>298.627.740</b>	<b>87,05</b>
1	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota		42.479.600	37.416.800	88,08
	1.1	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	42.479.600	37.416.800	88,08
2	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kab/Kota		183.121.100	154.130.500	84,17
	2.1	Pengembangan Layanan Pengujian	66.783.000	51.034.040	76,42
	2.2	Pengembangan Layanan Kalibrasi	116.338.100	103.096.460	88,62
3	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kab/ Kota		117.455.400	107.080.440	91,17
	3.1	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen	100.552.600	94.557.640	94,04
	3.2	Fasilitasi Penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen	16.902.800	12.522.800	74,09

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi	
				(Rp.)	Keu (%)
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</b>		<b>3.406.301.000</b>	<b>3.404.459.700</b>	<b>99,95</b>
	1	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.350.000.000	3.350.000.000	100
	1.1	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk dalam Negeri di Tingkat Provinsi	3.350.000.000	3.350.000.000	100
	2	Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	56.301.000	54.459.700	96,73
	2.1	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	56.301.000	54.459.700	96,73
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>		<b>3.789.845.600</b>	<b>3.702.478.071</b>	<b>97,69</b>
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	3.789.845.600	3.702.478.071	97,69
	1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	122.404.750	114.005.810	93,14
	1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	61.682.400	59.068.200	95,76
	1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	118.353.200	105.362.800	89,02
	1.4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.487.405.250	3.424.041.261	98,18
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI</b>		<b>57.328.100</b>	<b>45.680.930</b>	<b>79,68</b>
	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)	57.328.100	45.680.930	79,68
	1.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perijinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi	57.328.100	45.680.930	79,68
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL</b>		<b>43.654.800</b>	<b>37.606.738</b>	<b>86,15</b>
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	43.654.800	37.606.738	86,15
	1.2	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri, serta data Lain Lingkup Provinso melalui SIINAS	43.654.800	37.606.738	86,15

### 3.3.2 Anggaran bersumber dari APBN

Tahun Anggaran 2022 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT mendapat total anggaran dari Dana Dekonsentrasi dengan total anggaran sebesar **Rp. 2.057.435.000,-** (Dua miliar lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Realisasi anggaran Dana Dekonsentrasi sebesar **Rp. 1.975.299.920,-** (Satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) atau sebesar **96,01%**.

Alokasi dan Realisasi Anggaran Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.17  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan APBN TA 2021

No	Program	Pagu (Rp.)	Reliasasi (Rp.)	%
1	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	964.000.000,-	963.342.700,-	<b>99,93</b>
2	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	699.314.000,-	620.236.820,-	<b>88,69</b>
3	Perdagangan Luar Negeri	394.121.000,-	391.720.400,-	<b>99,39</b>
	<b>Total</b>	<b>2.057.435.000,-</b>	<b>1.975.299.920,-</b>	<b>96,01</b>

## BAB IV

# P E N U T U P

### 4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT dalam kurun waktu tahun 2018-2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Secara umum, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diemban. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dengan kategori **Sangat Berhasil** atau **98,93%** .

Indikator yang belum mencapai target, menjadi perhatian untuk ditingkatkan pada tahun berikutnya.

### 4.2 PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

Pencapaian kinerja sektor industri dan perdagangan menunjukkan trend yang baik, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi sektor industri dan perdagangan sebagaimana tercermin pada beberapa indikator kinerja utama yang belum tercapai diantaranya :

1. Masih rendahnya Pertumbuhan sub sektor Industri Pengolahan di Pariwisata *Estate*;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana serta Penguasaan teknologi Industri;
3. Beban biaya bahan baku menjadi pendorong utama kenaikan total biaya produksi industri pengolahan;
4. Masih relatif tingginya biaya produksi dan menurunnya permintaan pasar;
5. Neraca perdagangan luar negeri daerah yang defisit diakibatkan karena nilai impor lebih tinggi dari nilai ekspor;
6. Belum efisiennya sistem logistik dan konektivitas antar daerah;
7. Kapasitas SDM UKM yang belum memadai;
8. Hasil produk unggulan belum dapat bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah.

Langkah-langkah kedepan yang harus dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan kedepan, antara lain :

- 1) Ketersediaan informasi data harga pasar secara real time untuk seluruh daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Terus membangun koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di daerah dalam hal sinkronisasi program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja;
- 3) Melakukan pembinaan dan pengembangan Industri Kecil dan Menengah secara berkelanjutan;
- 4) Memacu pertumbuhan industri menggunakan bahan baku lokal guna menekan impor dan mengurangi defisit neraca perdagangan.

**LAMPIRAN**  
**LEMBAR VERIFIKASI**  
**LEVEL 1**

**LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2022**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

REVIEWER : FUNGSIONAL PERENCANA

CATATAN KOREKSI :

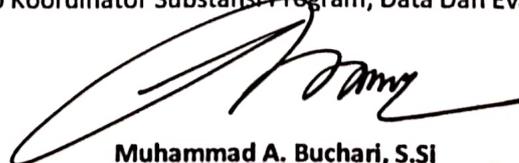
Memperhatikan kembali target Indikator program / kegiatan  
dlm Renstra dgn perubahan target dlm DPA Untuk  
menghitung capaian kinerja tahun 2022

Agar berkoordinasi dgn bidang terkait untuk mendapatkan  
data pendukung terupdate dlm pengukuran capaian kinerja  
tahun 2022

Memperhatikan konsistensi huruf, paragraf, spasi dan pemilihan  
kata

Kupang, Januari 2023

Sub Koordinator Substansi Program, Data Dan Evaluasi



**Muhammad A. Buchari, S.Si**

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19860326 20100 1 100

**LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2022**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

REVIEWER : SEKRETARIS

CATATAN KOREKSI :

- Rapihkan tata cara penulisan laporan
- Perbaiki sesuai koreksi terutama pada  
pebaruan alokasi bantuan pada halaman 37

Kupang, Januari 2023

Sekretaris,



**RR. Sulistyo Ambarsari, S.Sos, MM**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19650405 198901 2 003

**LEMBAR VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2022**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

REVIEWER : KEPALA DINAS

CATATAN KOREKSI :

Berkas koordinasi dgn Biro Organisasi mengenai peraturan atau pedoman terbaru pengurusan dan pelaksanaan LKIP

Koordinasi sinergis dgn Dinas atau instansi terkait terkait upaya menggalang dana dukungan pengurusan kegiatan Indikator program/ kegiatan dinas tahun 2022

Kupang, Januari 2023

Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Drs. Ec. M. NASIF ABDULLAH, MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19631016 199203 1 005

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN  
KINERJA 2022**



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM**

Jabatan : **KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Jabatan : **GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

16 November 2022

Pihak Kedua

**VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

Pihak Pertama,

**Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM**

**LAMPIRAN :**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**A. Sasaran Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam RENSTRA/IKU Perangkat Daerah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL		TARGET	FORMULA INDIKATOR
			2021	2022	2022	
1	2	3	4	5	6	
1.	Tumbuhnya Ekonomi daerah secara stabil dan berkelanjutan	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	1,2	1,25		$\frac{\text{Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
		Persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	10	11		$\frac{\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun } n}{\text{Total PDRB Tahun } n} \times 100\%$
2.	Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Persentase peningkatan nilai ekspor	2	3		$\frac{\text{Nilai ekspor tahun } n - \text{Nilai ekspor tahun } (n-1)}{\text{Nilai ekspor tahun } (n-1)} \times 100\%$

**B. Pelaksanaan Anggaran**

No.	Uraian	Alokasi	Keterangan
1)	APBD		
	a) Belanja (Program)		
		Rp. 18.821.831.170,-	Realisasi minimal 85%

1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	9.795.089.830,-	Realisasi minimal 90%
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	20.840.400,-	Realisasi minimal 85%
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	1.333.545.540,-	Realisasi minimal 85%
4.	Pengembangan Ekspor	Rp.	32.169.800,-	Realisasi minimal 85%
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	343.056.100,-	Realisasi minimal 85%
6.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	3.406.301.000,-	Realisasi minimal 85%
7.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	3.789.845.600,-	Realisasi minimal 85%
8.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	57.328.100,-	Realisasi minimal 85%
9.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	43.654.800,-	Realisasi minimal 85%
b) Pendapatan		Rp.	488.800.000,-	Realisasi minimal 90%
2)	APBN			
	<b>Program (Dekonsentrasi)</b>			
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp.	964.000.000,-	Realisasi minimal 90%
2.	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	Rp.	699.314.000,-	Realisasi minimal 90%
3.	Perdagangan Luar Negeri	Rp.	545.859.000,-	Realisasi minimal 90%
	<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>2.209.173.000,-</b>	Realisasi minimal 90%

C. Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah terkontrak harus direalisasi 100 %, kecuali terdapat kendala teknis yang dapat dipertanggungjawabkan;

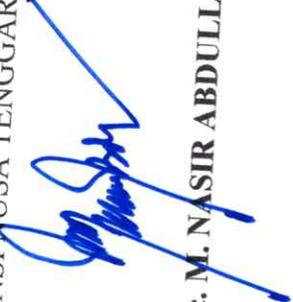
D. Penyampaian LKPD, LKPJ, dan LKIP paling lambat tanggal 4 Februari 2022;

E. Nilai Pelaksanaan SAKIP Minimal Kategori BB (>70-80);

- F. Nilai PMPRB Minimal Kategori A (> 80 -90);**
- G. Rata-rata realisasi PPK Online seluruh ASN di Perangkat Daerah minimal 90%;**
- H. Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP :**
1. TL temuan di bawah tahun 2020; Administrasi 100 %, Non Administrasi minimal 75 %;
  2. TL temuan di atas tahun 2020; Administrasi/Non Administrasi 90-100 %;
- I. Memiliki Sertifikat Manajemen ISO 9001: 2015;**
- J. Jumlah Inovasi Minimal 5 (lima) Jenis;**
- K. Pengelolaan Tata Naskah Dinas dan Penerapan Tanda Tangan Elektronik melalui Aplikasi e-NADI paling lambat Tanggal 1 Maret 2022;**
- L. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Minimal Kategori Baik (76,61-88,30);**
- M. Tingkat Keterbukaan Informasi Publik Minimal Kategori Menuju Informatif (75);**
- N. Jumlah PKS dengan Lembaga Mitra/NGO/LSM/Pihak lain yang mendukung pencapaian target IKU Perangkat Daerah.**

  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

16 November 2022

  
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Drs. Ec. M. NASIR ABDULLAH, MM



**LAMPIRAN  
FOTO KEGIATAN**

KEGIATAN FASILITASI SERTIFIKASI HALAL



## KEGIATAN PENGEMBANGAN KERAJINAN BAMBU



## KEGIATAN PENGEMBANGAN SENTRA DAN KAWASAN INDUSTRI





KEGIATAN PENGAMBILAN DATA HARGA



**KEGIATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT (POKIR)**



17 Des 2022 19.00.41  
9.86042625S 124.2605884166666E  
Jalan Gajah Mada  
Cendana  
Kecamatan Kota Soe  
Kabupaten Timor Tengah Selatan  
Nusa Tenggara Timur



## KEGIATAN PELATIHAN PEMASARAN ONLINE



KEGIATAN PENINGKATAN CITRA PRODUK (KATALOG PROMOSI)



KEGIATAN LAYANAN PENGUJIAN

